

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang giat mengadakan pembangunan di semua sektor kehidupan masyarakat. Adapun hakekat pembangunan Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang mana salah satunya dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional sehingga sumber daya manusia Indonesia menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkepribadian yang mampu membangun Negara Indonesia menjadi Negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia maka Pemerintah mengeluarkan Program Wajib Belajar melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Program ini menjamin anak Indonesia untuk bisa sekolah minimal jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan di harapkan mampu menangani permasalahan anak bangsa. Menurut John J. Cogan (dalam Winarno, 2013 :4) Pendidikan kewarganegaraan mengandung dua pengertian, yakni *Citizenship Education* dan *Civic Education*. *Civic Education* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit, yaitu sebagai bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran, mata kuliah, atau kursus di lembaga sekolah, universitas, atau lembaga formal lain. Sedangkan *Citizenship Education* mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan, tetapi bentuk-bentuk informal dan non formal pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain *Civic Education* merupakan bagian dari *Citizenship Education*.

Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) telah di tanamkan sejak di Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Undang-undang No 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) sebagai sesuatu yang wajib dalam kurikulum pendidikan nasional dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan atas pasal 37). Winarno (2013:26) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga aspek, yakni *Civic Knowledge* (Pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skill* (Ketrampilan), dan *Civic Disposition* (Sikap). Dimana ketiga komponen tersebut untuk membentuk *Smart and Good Citizen* (Warga negara yang cerdas dan baik).

Dalam rangka mewujudkan warga negara yang cerdas dan baik, *Citizenship Education* melalui pendidikan formal, namun juga di pendidikan non formal. Pendidikan non formal mencakup organisasi masyarakat, lembaga kursus, pesantren, masjid, panti asuhan, keluarga, dan lain-lain. Pendidikan moral dan sopan santun biasanya lebih banyak diperoleh melalui pendidikan non formal, khususnya di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam realitasnya, terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa tidak semua anak bernasib baik dan bisa menempuh pendidikan. Di negara ini banyak sekali anak-anak yang tidak bisa menempuh pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor dari keluarga menjadi salah satu penyebabnya. Kondisi

keluarga yang mengalami berbagai masalah keluarga diantaranya keluarga yang mengalami perpecahan (*broken home*), serta keluarga yang selalu terlilit oleh masalah perekonomian, bahkan anak yang sudah tidak memiliki lagi keluarga. Pada kondisi ini, keluarga serba tidak berdaya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup baik secara jasmani maupun rohani anak. Selain itu, keluarga tersebut juga tidak sanggup memberikan hak pendidikan yang cukup, sehingga keluarga gagal memenuhi fungsi dan perannya secara memadai.

Mengkaji lebih jauh tentang fungsi keluarga ini Chasiyah (2009 : 79) mengatakan,

“Secara sosiopsikologis, keluarga berfungsi sebagai: (1) pemberi rasa aman, (2) sumber pemenuhan kebutuhan, baik fisik maupun psikis, (3) sumber kasih sayang dan penerimaan, (4) model pola perilaku yang tepat untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik, (5) pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara sosial dianggap tepat, (6) membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan, (7) pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan, motorik, verbal, dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri, (8) stimulator bagi perkembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, baik di sekolah maupun di masyarakat, (9) pembimbing dalam mengembangkan aspirasi, dan (10) sumber persahabatan (teman bermain).

Apabila suatu keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi seperti telah dipaparkan di atas, maka keluarga tersebut berarti telah mengalami stagnasi atau disfungsi, yang pada gilirannya akan merusak stabilitas keluarga tersebut (khususnya terhadap perkembangan kepribadian anak). Adapun ciri-ciri keluarga yang mengalami disfungsi itu adalah ;

(1) kematian salah satu atau kedua orangtua, (2) kedua orangtua berpisah atau bercerai, (3) hubungan kedua orangtua tidak baik, (4) hubungan orangtua dengan anak tidak baik, (5) suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan, (6) orangtua sibuk dan jarang di rumah, (7) salah satu atau kedua orangtua mempunyai kelainan kepribadian atau gangguan jiwa (Chasiyah dkk, 2009 : 79).

Salah satu penyebab terjadinya disfungsi keluarga adalah status ekonomi rendah pada keluarga. Adapun pengaruh status ekonomi terhadap kepribadian peserta didik, bahwa orangtua dari status ekonomi rendah cenderung lebih

menekankan kepatuhan kepada figur-figur yang mempunyai otoritas; kelas menengah dan atas cenderung menekankan kepada pengembangan inisiatif, keingintahuan, dan kreatifitas peserta didik. Chasiyah dkk, (2009 : 79) mengatakan,

“Orangtua yang mengalami tekanan ekonomi atau perasaan tidak mampu mengatasi masalah finansialnya, cenderung menjadi depresi, dan mengalami konflik keluarga, yang akhirnya mempengaruhi peserta didik, seperti : kurang percaya diri, prestasi belajar rendah, kurang dapat bergaul dengan teman, mengalami masalah penyesuaian diri (karena depresi dan agresi)”

Keberadaan moral anak sekarang dalam situasi memprihatinkan. Pada era globalisasi ini, terdapat serangkaian permasalahan yang muncul dengan cepat seiring perkembangan jaman, perkembangan teknologi, serta modernisasi yang merupakan akibat sampingan dari proses pembangunan yang digalakkan. Adapun beberapa permasalahan tersebut salah satunya adalah kemerosotan moral anak. Perilaku menyimpang menjadi pemberitaan sehari-hari di berbagai media masa. Setiap hari kita mendengar berita tentang tindakan amoral anak-anak dan remaja. Televisi dan surat kabar memberitakan pemerkosaan yang korban maupun pelakunya siswa sekolah, pengguguran kandungan, minuman keras di kalangan remaja dan anak, perjudian di kalangan siswa, tawuran antar sekolah, pencurian-perampokan. Terjadinya degradasi moral pada generasi muda saat ini juga ditandai dengan fenomena anak-anak yang kurang memiliki akhlak yang baik, sopan santun, tata krama, dan etika yang baik. Zubaedi (2009:35) mengatakan “krisis moral dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu hilangnya karakter bangsa dan lingkungan sosial yang kurang kondusif”. Lingkungan sosial mempunyai andil sebagai sebab terjadinya krisis moral pada generasi muda.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia di tahun 2015 terdapat 18.89% penduduk yang buta huruf. Artinya sekitar 437.000 penduduk Indonesia yang tidak tahu baca tulis. Angka Putus Sekolah usia SMP mencapai 22%, sedangkan usia SMA Mencapai 40%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata sehingga *Civic Educatio* nmaupun *Citizenship Education* tidak bisa dirasakan oleh semua anak bangsa. Selain itu kurangnya *skill* pada anak bangsa Indonesia juga menjadi permasalahan yang

perlu di tangani bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banyaknya pengangguran di negara ini menjadi salah satu tanda bahwa *Skill* pada anak bangsa menunjukkan di angka rendah. Di tahun 2015 pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7% dari jumlah angkatan kerja. Kurangnya lapangan kerja dan *skill* pada penduduk Indonesia menyebabkan banyaknya jumlah angkatan kerja yang bekerja sebagai TKI atau TKW. Terdapat 429.872 jiwa ditahun 2014 yang bekerja di luar negeri yang mayoritas menjadi buruh rumah tangga.

Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945 telah menjamin kesejahteraan untuk anak – anak miskin dan terlantar. “Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar di pelihara oleh negara” (UUD RI 1945 Pasal 34 ayat 1). Sebagai wujud konkrit usaha dan kepedulian pemerintah serta elemen masyarakat dalam menanggulangi masalah ini adalah berupa didirikannya lembaga sosial kesejahteraan anak yaitu panti asuhan. Sebagai lembaga sosial kesejahteraan anak, panti asuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan anak yang memberikan makan dan minum setiap hari namun sebagai lembaga pendidikan anak.

Di dalam panti asuhan berlangsung proses sosialisasi nilai-nilai hidup bermasyarakat, nilai-nilai keagamaan dan sebagaimana diharapkan akan dapat mempersiapkan mental anak-anak dalam hidup bermasyarakat nantinya. Tujuan utama panti asuhan adalah membentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya (Depsos RI, 2004 : 6). Sehingga panti asuhan diharapkan bisa mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta menjadi komponen pendukung tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan *Smart and Good Citizenship*.

Lintawati (2007) dengan Penelitiannya yang berjudul “Peranan Pendidikan Untuk Membentuk Sikap Kemandirian Pada Anak Asuh (Studi Deskriptif Kualitatif di Panti Asuhan Muhammadiyah Surakarta)”, menunjukkan bahwa Panti Asuhan memiliki peran dalam membentuk karakter anak, yakni karakter mandiri. Pembentukan karakter mandiri pada anak asuh tersebut lebih banyak dilakukan dengan pendidikan non formal dan informal di Panti Asuhan. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan keterampilan dan pendidikan keagamaan. Tujuan yang terakhir

adalah melihat secara kritis nilai-nilai fundamental pendidikan di panti asuhan yang dalam penelitian ini adalah melihat secara kritis nilai-nilai moral dan karakter di panti asuhan yang mampu menciptakan anak sebagai generasi muda yang memiliki karakter mandiri. Pendidikan informal yang terdapat di panti asuhan adanya sistem kekeluargaan yang harmonis antara pengasuh dan anak asuh, sistem keteladanan di mana pengasuh atau beberapa anak asuh saling memberikan teladan satu sama lain agar tercipta kedisiplinan dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pada diri anak asuh, adanya sistem kedisiplinan yang dapat memotivasi anak asuh untuk berbuat lebih baik lagi. Jika dikaitkan dengan *Citizenship Education* maka penelitian ini masuk ke ranah *Civic Disposition* (karakter kewarganegaraan) pada anak asuh.

Penelitian lain dilakukan oleh Dwi Nurul Fatmawati (2007) dengan judul “Pola Pengasuhan di anti Asuhan Yatim PKU Aisyiyah Cabang Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 dengan tujuan untuk mengetahui pola pengasuhan di panti asuhan Yatim PKU Aisyiyah cabang Blambangan, kecamatan Bawang, kabupaten Banjarnegara. Pola pengasuhan yang diterapkan di panti asuhan Yatim PKU Aisyiyah adalah pola pengasuhan demokratis. Panti asuhan ini memberikan berbagai macam pendidikan dan keterampilan kepada anak-anak asuh agar setelah keluar dari panti asuhan mereka dapat hidup mandiri dan mempunyai kecakapan hidup. Anak asuh memiliki kesempatan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan formal. Selain pendidikan formal, pendidikan yang diberikan meliputi pendidikan agama dan pendidikan moral (akhlak), sedangkan keterampilan yang diberikan meliputi menjahit, memasak, membuat kerajinan tangan, komputer. Dalam penelitian ini, panti asuhan memiliki peran penting dalam membentuk anak-anak asuh sebagai generasi muda yang cerdas, mandiri, giat, dan tekun agar berguna bagi nusa dan bangsa melalui pola asuh di panti asuhan. Jika dikaitkan dengan komponen pendidikan kewarganegaraan, maka penelitian ini ke ranah *Civic Skill* serta *Civic Knowledge*.

Panti Asuhan AL-AMIN merupakan salah satu panti asuhan yang terdaftar dengan akta notaris SK Menteri Kehakiman RI No. : C-65.HT.03.01-TH. 1998 didirikan oleh organisasi Angkatan Muda Muhammadiyah Jetis Daerah Ponorogo.

Panti Asuhan AL-AMIN Muhammadiyah cabang Jetis Ponorogo sebagai salah satu lembaga kesejahteraan sosial anak yang memberikan pelayanan sosial pada anak mengupayakan memberikan kontribusinya dalam menangani masalah anak bangsa. Pelayanan sosial dan kesejahteraan anak yang dimaksud adalah kehidupan yang layak khususnya pendidikannya. Melalui pendidikan formal, non formal, maupun informal yang ada di Panti Asuhan AL-AMIN diharapkan mampu memberikan sumbang sih terhadap anak dalam rangka memberikan pendidikan umum, agama, karakter, maupun ketrampilan.

Berdasarkan observasi awal di Panti Asuhan Yatim/Piatu/Dhuafa' AL-AMIN Muhammadiyah Cabang Jetis Kabupaten Ponorogo, Anak asuh di panti asuhan memiliki latar belakang keluarga yang rata-rata hampir sama yaitu mereka hanya memiliki satu orangtua, tidak memiliki orangtua, serta latar belakang kemiskinan. Sebagian anak asuh datang dengan membawa masalah sosial yang memerlukan penanganan intensif. Masalah sosial tersebut seperti, (1) anak asuh tidak memiliki orangtua, sehingga kasih sayang, perhatian, serta pendidikan dari orangtua tidak pernah mereka dapatkan, (2) anak asuh dari latar belakang kemiskinan yang menyebabkan mereka tidak bisa menempuh pendidikan formal, (3)serta kondisi lingkungan anak asuh berasal yang mayoritas masyarakatnya kurang memperhatikan pentingnya pendidikan, sehingga kebutuhan pendidikan khususnya pendidikan formal tidak bisa terpenuhi,

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengadakan penelitian yang berjudul **“Peran Panti Asuhan dalam Membentuk *Smart and Good Citizen* (Studi di Panti Asuhan Yatim/Piatu/Dhuafa' AL-AMIN Muhammadiyah Cabang Jetis Kabupaten Ponorogo)”**.